

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Literature Review.**

Penerapan E-Government di Indonesia marak semenjak dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk penerapan E-Government. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi penerapan E-Government dalam melayani masyarakat dalam pelayanan penerapan kerja dengan menghadirkan Bursa Kerja Online (BKOL) yang telah dikembangkan sejak tahun 2009 setelah adanya kerjasama pemerintah dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-Government melalui bursa kerja online dilihat melalui empat indikator penentu keberhasilan implementasi. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi melalui keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa hubungan komunikasi antar pemerintah sudah baik, dari segi sumberdaya dan disposisi masih kurang baik, dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, serta masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan bursa kerja online tersebut dalam mewujudkan pelayanan public (Citra Anisa, 2011).

Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan TIK dengan istilah E-government. Penerapan E-government merupakan amanat

Inpres No.3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tatakelola pemerintah dan pelayanan publik membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dapat dieliminir melalui pemanfaatan e-government menjadi lebih fleksibel, dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. Selain itu e-government menawarkan pelayanan publik secara 24 jam. Sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sebagai sebuah badan atau lembaga publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membuat kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) bertujuan untuk menerapkan e-government. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara elektronik dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai implementasi e-government di kominfo. E-government ini, adalah program yang dijalankan oleh dinas kominfo untuk melakukan penyebaran informasi, pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat, bisa terjadinya peningkatan antara hubungan pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis, dan pelaksanaan pemerintah lebih efisien, sebuah program yang bagus untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, terlebih lagi bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dari pihak pemerintah. Namun program yang direncanakan dari tahun 2012 ini, belum berjalan dengan baik. Masih adanya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program e-

government ini pada masyarakat, yang belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Dan tidak adanya lagi tempat untuk mengakses internet atau wifi dari pemerintah untuk masyarakat luas. Oleh sebab itu kominfo bisa membuka kembali lokasi berbasis internet atau wifi untuk membantu masyarakat dalam mencari informasi yang harus diakses melalui internet (Pasaribu Humisar Parsaorantua, 2017).

Perkembangan teknologi, informasi dan komputer telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Kota Cimahi telah memanfaatkan teknologi komputer dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan e-Government. Pelayanan yang baik berhubungan dengan kinerja aparatur, sehingga aparatur menjadi unsur penentu keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatori survey. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, kuesioner, interview dan studi pustaka. Sedangkan ukuran sampel ditentukan berdasarkan probabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-Government memberikan pengaruh sebesar 54,85% terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi, sedangkan sisanya sebesar 45,15% merupakan pengaruh faktor-faktor lain. Hal tersebut memberikan bukti empiris bahwa semakin baik implementasi kebijakan e-Government maka semakin meningkat kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi. Komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, serta struktur birokrasi telah

memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan kebijakan. Hal yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini adalah konsistensi sikap implementor sejak perencanaan sampai dengan pengawasan mulai tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan (Dewi Kurniasih, Tatik Fidowaty, Poni Sukaesih, 2013).

## **B. Kerjasama sebagai Akibat dari Timbulnya Interdependensi Antar Negara.**

Untuk memberikan landasan tertulis yang kuat dalam menganalisa suatu permasalahan, maka penulis beranjak dari pemahaman akan suatu fenomena. Fenomena yang ada yang terjadi dalam hubungan internasional dalam hal ini adalah masalah perkembangan e-Government, karena dalam melaksanakan serta meningkatkan kehidupan suatu bangsanya, suatu negara dituntut untuk mengadakan suatu interaksi dengan negara lainnya dalam bidang apapun. Pelaku dari hubungan antar negara atau hubungan internasional tersebut dapat terjadi melalui hubungan-hubungan, dimana setiap negara pada dasarnya adalah peserta dalam hubungan internasional, tetapi dengan intensitas keterlibatan dan aktifitas yang berbeda yang ruang lingkupnya meliputi segala bentuk interaksi negara dengan berbagai aspek internasional, selanjutnya istilah Hubungan Internasional didefinisikan, sebagai :

**“Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dalam politik internasional dan merupakan semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti : semua tingkah laku yang terjadi adalah berasal**

**dari negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain” (Trygve Mathiesen, 2007 : 1).**

Dengan adanya Hubungan Internasional, maka melahirkan suatu kerjasama internasional yang diperincikan secara terperinci, antara lain:

**“Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang, pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk yang memuaskan bagi semua pihak”. (K.J.Holsti, 2007 : 650)**

Setiap kegiatan pembangunan nasional memerlukan sejumlah biaya yang cukup besar dan biasanya keseluruhan dapat tersedia didalam negeri, maka dalam hal ini bantuan luar negeri merupakan faktor yang sangat penting artinya dalam tujuan untuk melaksanakan berbagai pembangunan didalam negeri.

Hubungan antar Indonesia dan Jepang merupakan salah satu contoh bagaimana interaksi kerjasama bilateral dilaksanakan sebagai wujud dari kerjasama antar negara dalam hubungan dengan faktor ekonomi, meskipun demikian hubungan itu memerlukan watak tentu yaitu hubungan yang tidak eksploitatif, karenanya persoalan yang timbul adalah bagaimana mengubah interdependensi ekonomi yang eksploitatif menjadi pola hubungan yang bersifat distributif dan seimbang.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa suatu negara adalah merupakan hal yang mustahil untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sendiri tanpa memerlukan suatu bentuk kerjasama dengan negara lain. Timbulnya kerjasama internasional disebabkan adanya

interdependensi antar negara. Adapaun batasan yang diberikan, sebagai berikut :

**“Kerjasama Internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan, akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional”.** (Koesnadi Kartasasmita, 2008 : 120)

Sebagian besar interaksi dan transaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian berbagai negara.

Mengingat semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam setiap negara, maka kerjasama antar negara ini dapat mencakup semua bidang seperti : ekonomi, sosial, budaya dan teknik. Kerjasama internasional dibidang ekonomi dengan sendirinya suatu negara dapat memasarkan hasil produksi dan menghasilkan barang-barang yang tidak tersedia untuk memenuhi kelangsungan produksi dari negara lain, sehingga akhirnya menimbulkan transaksi jual beli antar negara.

Indonesia seperti bangsa negara lain, terutama dalam proses pembangunan ekonominya masih memiliki ketergantungan, maka sendirinya Indonesia mengadakan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara lain, sebagai berikut :

**“Kerjasama dalam pembangunan ekonomi sekarang ini merupakan tujuan ekonomi setiap negara, karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber, kemampuan administrasi**

**dan keterampilan teknisnya”.** (Teuku May Rudi, 2003 : 119)

Demikian pula, bahwa pada dasarnya suatu negara akan melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Untuk lebih jelasnya, adalah sebagai berikut : **“Pada jaman sekarang ini hampir tidak ada negara didunia ini yang tidak mempunyai hubungan ekonomi di luar negeri”.** (Ace Partadireja, 2015 : 114)

Seperti halnya hubungan kerjasama ekonomi antar Indonesia dan Jepang yang terjalin dan telah berlangsung sejak lama. Kerjasama ini pada dasarnya apabila dilihat dari secara sepintas nampaknya telah banyak membuahkan hasil, bagi Inonesia maupun Jepang sendiri. Dimana kendala yang dihadapi oleh Indonesia antara lain keterbatasan dana (modal), teknologi, tenaga ahli, dan tentunya sederetan kendalanya yang merupakan ciri khas dari setiap negara yang sedang berkembang.

Berdasarkan asumsi dasar tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa hubungan kerjasama antar ekonomi Indonesia dan Jepang adalah merupakan suatu kerjasama yang didasari oleh sikap yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Pola interaksi ini kiranya yang dapat menimbulkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara negara Indonesia dan Jepang.

### **C. Konsep Industrialisasi dalam Dinamika Pembangunan.**

Hubungan internasional merupakan suatu bidang kajian yang luas, mencakup berbagai hal baik, ekonomi maupun sosial budaya. Selama dua

dasawarsa terakhir, perhatian utama dunia perekonomian ditujukan pada cara-cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Para ahli ekonomi dan politisi dari berbagai negara memuja pertumbuhan ekonomi sebagai suatu sakral pada setiap tahun.

Kajian-kajian Hubungan Internasional bermanfaat menganalisa segi-segi peluang dan hambatan bagi pencapaian kepentingan nasional dalam kiprah hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan suatu ilmu interdisipliner mengenai hubungan antar negara serta antar bangsa mengenai keterhubungan masing-masing negara dan bangsa terhadap lingkungannya, dengan melihat permasalahan tersebut diatas, memberikan definisi tentang pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

**“Kenaikan jangka panjang dalam kemampuan negara untuk menyediakan semaki banyak jenis-jenis barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagan ideologis yang diperlukannya”.** (M.L. Jhingan, 2008 : 72)

Memahami definisi diatas, maka terdapat tiga komponen penting, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tampak dari meningkatnya ekonomi cara terus menerus persediaan barang.
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi mentukan deraat pertumbuhan dalam menyediakan aneka macam arang kepada penduduk

3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisiensi memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi, sehingga yang dihasilkan ilmu pengetahuan umat manusia dapat bermanfaat secara tepat. (M.L. Jhingan, 2008 : 72 - 73)

Tindakan suatu negara dalam meningkatkan suatu pembangunan umumnya dewasa ini lebih mengarah pada peningkatan industrialisasi. Definisi bahwa industrialisasi adalah : **“Percepatan pertumbuhan produksi barang dilaksanakan dalam penawaran yang diimbangi dengan pertumbuhan yang serupa dibidang permintaannya, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri”** (Edi Suandi Hamid, 2006 : 15).

Perkembangan industrialisasi sebagai bagian dari hubungan bilateral Indonesia dan Jepang yang dipengaruhi pula oleh perkembangan industrailisasi dunia. Hal ini akan selalu mengingat hubungan kedua negara diwaktu yang akan datang. Pola ketergantungan industrialisasi tersebut didefinisikan, sebagai :

**“...yang dimaksud dengan ketergantungan adalah keadaan dimana negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi dan negara-negara lain, dimana tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan Internasional antar sistem ekonomi ini dengan perkembangan dunia menjadi ketergantungan bila ekonomi beberapa negara bisa berekspansi dan berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negara lainnya mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif”.**  
(Theono Dos Santos, 2002)

Distribusi atau pembagian ekonomi dalam arti kata kemajuan, tidaklah semata berarti menambah jumlah produksi dan mempertinggi produktivitas perkapita sebagai numerik pukul rata.

Pembangunan seharusnya diartikan sebagai kemajuan bagi masyarakat seluruhnya, maka dasar dan cara hasil produksi haruslah mengandung nilai sosial dan fungsional bagi sebagian masyarakat, antar proses industrialisasi dan aspek masyarakat terdapat korelasi yang mutualistis.

Semua negara didunia memperlihatkan ketidaksamaan pada tingkat tertentu, seseorang akan menemui perbedaan yang besar antar pendapatan negara maju dengan negara yang miskin baik di utara maupun selatan, terlihat dinegara-negara berkembang bila dibandingkan dengan negara maju.

Tingkat perkembangan industrialisi tidak diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan perkapita, tetapi juga harus dilihat bagaimana pendapatan tersebut di distribusikan pada penduduk dalam arti siapa yang mengenyam hasil industrialisasi tersebut dan bagaimana kemampuan masyarakat untuk memiliki suatu produk industri.

#### **D. Industri dan Teknologi dalam Perspektif Ekonomi Internasional.**

Corak teknologi yang ada pada saat ini telah mempengaruhi corak nilai-nilai kehidupan sebelumnya dan telah menjadi pegangan hidup sejak dulu. Pada waktu sekarang ini telah banyak terjadi perubahan-perubahan dalam perkembangan teknologi.

Teknologi yang diciptakan demi kemajuan dan efisiensi juga mempunyai sifat khas mengexploitas penduduk maupun sumber dayanya, yang pada akhirnya akan mempunyai sifat pola pikiran yang berbeda dan lebih mengutamakan segi kualitatif bukan dari segi kuantitatif. Aspek ketiga dari teknologi adalah elitisme, struktur teknologi menentukan bahwa jenis teknologi hanya akan ditangani oleh suatu kelompok tertentu.

Menciptakan teknologi yang canggih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap negara yang ingin menciptakan peralatan teknologi tinggi harus memiliki biaya yang banyak dan memiliki perekonomian yang kuat. Oleh karena itu negara-negara kecil dan negara berkembang berusaha untuk mewujudkannya dengan mencari bantuan luar negeri.

Negara yang menjual dan yang memberi pinjaman juga mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit, dengan menjual hasil teknologinya maka negara tersebut dapat memperoleh pemasukan keungan negara (devisa). Negara yang memberikan pinjaman akan memperoleh hasil bunga pinjaman dari negara yang minta bantuannya tadi. Hal tersebut dilakukan oleh suatu negara sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi bangsanya.

Hubungan antara negara dalam beberpa hal yang mengacu kepada ekonomi internasional yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara suatu negara lainnya (Boediono, 2001 : 1).

Maka dapat dikatakan ekonomi internasional merupakan bagian dari hubungan internasional. Ekonomi internasional lebih kecil ruang lingkungannya dibandingkan dengan hubungan internasional, karena hubungan internasional mempelajari seluruh bentuk hubungan yang melintas batas-batas suatu negara sedangkan ekonomi internasional hanya mempelajari hubungan ekonomi yang melintas atau terjadi antar negara.

Adapun yang dipelajari dalam ekonomi internasional meliputi perdagangan, bantuan luar negeri dan penanaman modal asing (investasi). Bila dilihat kembali definisi ekonomi internasional yang dikemukakan oleh Boediono, dimana ekonomi internasional ditekankan pada hubungan ekonominya, Boediono mengatakan bahwa hubungan ekonomi antar negara mempunyai tiga bentuk hubungan, yaitu:

1. Hubungan ekonomi bisa berupa pertukaran hasil output negara yang satu dengan negara yang lain.
2. Hubungan ekonomi bisa berbentuk pertukaran atau aliran produksi atau faktor produksi.
3. Hubungan ekonomi antar negara bisa dilihat dari segi konsekuensinya terhadap posisi utang piutang suatu negara terhadap negara lain (Boediono, 2001 : 3).

Sebab-sebab munculnya hubungan ekonomi antar negara adalah:

1. Perbedaan tingkat kerajangan (*scarcity*), apabila suatu negara tingkat *scarcity*-nya lebih rendah maka negara ini akan mengalirkan barang-barang kenegaralain dimana *scarcity*-nya lebih tinggi.
2. Perbedaan faktor produksi, perbedaan faktor produksi antara negara yang satu dengan negara lain akan menyebabkan negara-negara itu terjadi daerah yang surplus dan daerah minus.
3. Perbedaan komperatif dari harga barang, selama ada perbedaan komperatif daripada harga-harga barang selama itu pula akan timbul ekonomi yang mengalir antara Negara (Boediono, 2001 : 4).

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi internasional yang berkenan dengan fungsi produksi dan aktivitas dari adanya pertukaran barang dan jasa yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknologi baik itu dalam bentuk perdagangan maupun pinjaman luar negeri.

#### **E. Teknologi Informasi dalam Dinamika Hubungan Internasional.**

*Cyberspace* adalah tempat kita berada ketika mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama Internet. Secara fisik, Internet tak lain adalah sekumpulan komputer, tersebar di seluruh dunia, yang dihubungkan satu sama lain melalui jaringan telekomunikasi satelit global dan kabel telepon lokal. Istilah *Cyberspace* itu sendiri diciptakan oleh seorang penulis fiksi ilmiah, William Gibson, yang membayangkan adanya dunia maya atau virtual di dalam jaringan komputer yang mensimulasikan dunia nyata kita sehari-hari.

Memerag sulit dibayangkan bila belum dialami. Namun, sebuah uraian singkat berikut mungkin bisa memperjelas.

Di antara dua orang yang bercakap-cakap tentunya ada ruang. Ketika bercakap-cakap secara lisan, ruang itu tak lain adalah ruang fisik yang tiga dimensi itu. Jika bercakap-cakap lewat telepon, tentunya ada sejenis ruang juga yang mengantarai kita. Ruang itulah yang disebut sebagai *cyberspace* (William Gibson, 2004). Kiasan atau metafora ruang ini memang menjadi lebih relevan ketika terjadi komunikasi di antara lebih dari dua orang dan masing-masing berada di tempat-tempat yang tersebar di penjuru bumi sebab ruang itu kini tidak hanya mengantarai, tetapi justru melingkungi para komunikator dalam jaringan komputer. Dan ketika yang berkomunikasi bukan hanya dua atau banyak manusia, melainkan juga mesin-mesin informasi alias komputer, kiasan ruang itu semakin relevan.

Namun, ketika bentuk komunikasi itu menjadi lebih beragam dengan ikut sertanya sang komputer, melalui Internet, gaya bahasa kiasan alias metafora itu tidaklah memadai untuk melukiskan ruang yang baru itu. Suatu gaya bahasa lebih memperjelas adalah analogi. Dengan adanya komputer, informasi sebenarnya bukan hanya bisa disampaikan ke orang lain, melainkan juga bisa disimpan sebagai data dalam memori komputer.

Informasi yang tersimpan itu kemudian bisa diambil lagi bila diperlukan, bahkan bisa diolah dan diubah-bentuk oleh mikroprosesor, jantung sang komputer. Pengolahan data dalam komputer itu dilakukan mikroprosesor sesuai dengan perintah atau program. Program-program pengolah informasi ini

juga disimpan dalam memori. Dan informasi yang bisa disimpan dan diolah itu tidak hanya suara, tetapi juga tulisan, gambar, foto, dan video-klip.

Dengan demikian, kita dapat mengumpamakan pelbagai data dan program pengolahnya itu sebagai barang-barang dan alat-alat virtual atau maya yang berada dalam *cyberspacecyberspace itu*. Jadi, *cyberspace* tidak saja melingkungi diri kita, tetapi juga dihuni oleh benda-benda maya yang dalam kenyataannya, semakin lama semakin banyak saja. Ietulah sebabnya, di awal tulisan ini, kata “mayantara” digunakan untuk menjadi padanan kata bahasa Indonesia bagi kata bahasa Inggris, *cyberspace*.

Jadi, di dalam ruang baru yang bernama mayantara ini manusia tidak hanya bisa berkomunikasi satu sma alain, tetapi juga bisa mencari informasi, data, atau program di *gudang* (alias memori) yang berada di *pelabuhan* (alias komputer) di pantai lautan komunikasi global bernama Internet. Sementara di dunia nyata sehari-hari kita mencari informasi di perpustakaan, Internet pun dapat dipandang sebagai sebuah kompleks gedung perpustakaan raksasa yang sangat aneh. Di kompleks perpustakaan maya ini terdapat sebuah buku tunggal bernama WWW (World Wide Web), atau sekarang dikenal dengan sebutan *web* saja, terdiri dari berjuta-juta halamm, berserakan di seluruh penjuru dunia.

Halaman-halaman *web* tersebut Saling berkait satu sama lain melau yang disebut *hyperlink*, yaitu tulisan atau gambar yang ada di setiap halaman, yang merujuk ke halaman-halaman *web* lainnya. Sementara sebuah buku terdiri dari bab, *web* terdiri dari situs yang terdiri dari kumpulan halaman *web* dalam

satu komputer-simpul jaringan Internet yang merujuk satu sama lainnya melalui *hyperlink* dan juga merujuk situs-situs lain di komputer lain di negara lainnya. Dengan demikian, Internet dapat diibaratkan sebagai sebuah gedung perpustakaan maya.

Akan tetapi, dalam gedung bernama informasi bernama Internet itu, kita tidak hanya bisa mencari informasi, tetapi juga bisa berdiskusi di dalam ribuan ruangan komunikasi yang disebut *newsgroup mailing list*, atau *chat room*. *Newsgroup* bisa diibaratkan sebagai sebuah majalah dinding besar yang bisa diisi dan dibaca oleh siapa saja melalui surat elektronik. *Mailing list* alian milis dapat diibaratkan sebagai kumpulat surat terbuka elektronik yang dikirimkan langsung kepada anggota-anggotanya. *Chat* (alias IRC atau Internet Relay Chat) dapat diibaratkan sebagai ruang santai yang di dalamnya banyak orang di seluruh pelosok dunia dapat mengobrol secara tertulis tanpa bertatap muka pada waktu yang bersamaan.

Dilihat dari sisi itu, tampaknya, Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi budaya yang menjanjikan, menembus batas-batas antarnegara, dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, sejak 1993, Internet dibuka untuk umum dan ribuan perusahaan dan organisasi, pemerintah dan swasta, memasang situs *web* masing-masing di sana. Akhirnya, Internet pun milik semua orang, menjadi tempat penyimpanan dan pertukaran informasi dari satu penjuru ke penjuru bumi lainnya.

## **F. Bantuan Teknologi Informasi Jepang dan E-Government di Indonesia.**

Seperti halnya Hubungan Internasional, yang menyangkut interaksi negara dengan berbagai aspeknya, dimana didalam interaksinya terdapat berbagai persoalan pengaruh dari tingkah laku suatu negara yang dapat mempengaruhi yang lainnya, maka untuk menghadapi persoalan pengaruh dari luar yang digariskan untuk menjelaskan sasaran yang ingin dicapai dicanangkanlah Politik Luar Negeri. Selain Politik Luar Negeri pada hakekatnya merupakan tindakan yang ditunjukkan ke luar negeri dalam menghadapi persaingan global antar negara. Politik Luar Negeri didefinisikan, sebagai berikut :

**“Politik Luar Negeri adalah sekumpulan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksud untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang ditetapkan khususnya tujuan-tujuan untuk suatu kurun waktu”.** (Supena Prawirasaputra, 2004 : 7)

Komunikasi internasional berfungsi untuk mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih. Komunikasi internasional membantu usaha-usaha untuk mencapai tujuan hubungan internasional dan meningkatkan hasil yang didapat dari hubungan internasional dan meningkatkan hasil yang didapat dari hubungan tersebut. Dalam hal ini komunikasi internasional didefinisikan, sebagai berikut :

**“Komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Komunikasi internasional berfungsi mendinamisasikan hubungan internasional yang**

**dijalin antara dua negara atau lebih”.** (Dedi Jamaludin Malik, 2003 : 12)

Kemajuan di bidang teknologi informasi telah mengubah cara pandang masyarakat dunia terhadap dunia itu sendiri. Sejalan dengan pendapat tersebut, adalah :

**“Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat membuat bola dunia terasa makin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Cara pandang terhadap duniapun sudah berubah. Teknologi informasi dalam perubahan cara pandang itu telah menjadi ujung tombak berbagai perubahan lain yang dirasakan manusia di muka bumi ini”.** (Yanuar Nugroho, 2018)

Di negara-negara maju, hasil dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya teknologi digital (*Electronic Digital Services*) telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru, yang mereka istilahkan sebagai *Electronic Goverment (e-Goverment)*. Berbagai definisi yang ada mengenai e-Goverment (tergantung dari negara yang bersangkutan) memperlihatkan sebuah keinginan yang sama, yaitu bertransformasi bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokrasi, menjadi mekanisme hubungan interaksi yang lebih jauh lebih bersahabat.

Memperhatikan akan pentingnya komunikasi bagi memasyarakatkan suatu tujuan politis maupun ekonomis, Jepang sebagai negara maju sangat konsisten membantu Indonesia dalam pengembangan teknologi informasi, berkenaan dengan informasi Jepang pula menjadi negara yang kuat dan maju secara ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang sangat memerlukan adanya bantuan luar negeri dalam memperbaiki infrastruktur

dalam membangun pelayanan komunikasi yang terpadu guna mengantisipasi dari berbagai kemungkinan yang dapat berakibat pada instabilitas politik dalam negeri. Sejalan dengan pandangan tersebut, penulis uraiakan mengenai bantuan Jepang sebagai berikut :

**“... Jepang membantu Indonesia dalam penyediaan teknologi informasi yang berupa infrastruktur bagi pengembangan e-governement di Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dan akses data yang penting bagi pengembangan sosial masyarakat di Indonesia, sekaligus membawa dampak positif bagi kepentingan ekonomi dan politik menjelang PEMILU Legislatif maupun Eksekutif”. (Kompas, 2014)**

Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing komunitas.

Pengertian dan penerapan e-Government di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan.

Gambaran mengenai Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e-Government secara ringkas, padat, dan jelas, yaitu : **“E-Government memilih untuk mengirimkan informasi pemerintah dan hubungan langsung melalui internet atau melalui hal-hal digital lainnya”**. (Richardus Eko Indrajit, 2003 : 3)

Lebih jauh multi media Indonesia, memberikan gambaran mengenai e-governement Indonesia yang dilihanya masih memiliki sisi minus dari

kemampuan sumber daya manusianya, secara rincinya dapat diuraikan sebagai berikut :

**“E-Goverenment di Indonesia merupakan sebuah kecenderungan global yang harus diadopsi oleh kalangan pemerintahan di Indonesia, baik pusat maupun daerah. Akan tetapi daya dukungan sumber daya manusia yang menjadi *operated* dalam menggunakan sarana tersebut sangatlah minus. Ada baiknya pemerintah menyadari hal tersebut dengan secepat mungkin memberikan penyuluhan maupun pendidikan dan latihan guna lebih memantapkan lah fungsi dan faedah e-goverenment di Indonesia”.** (Roy Suryo, 2005 : 2)

Pemerintah New Zealand melihat e-Government sebagai sebuah fenomena sebagai berikut:

**“E-Government adalah cara pemerintah menggunakan teknologi terbaru untuk mempengaruhi orang-orang dengan akses yang sangat bagus dan nyaman untuk informasi dan pelayanan pemerintah, untuk membuktikan pelayanannya dan bisa membuka kesempatan bagus untuk berpartisipasi di dalam institusi dan proses demokrasi”** (Roy Suryo, 2005 : 4)

Sementara itu di Indonesia pada tanggal 9 Juni 2003 telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan E-Government. Instruksi Presiden tersebut ditunjukkan kepada Menteri, kepada LPND, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima TNI, KAPOLRI, Jaksa Agung, Gubernur, dan Bupati/Walikota, untuk :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional dengan berpedoman pada kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan e-Government sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

2. Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.
3. Melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua yang dikoordinasikan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi.
4. Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden (Kemeninfo, 2019).

Secara lebih sederhana, e-Government merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakatnya kapan dan dimanapun mereka bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang pemerintah berikan kepadanya. Hal ini merupakan salah satu bentuk fungsi pemerintah untuk memberikan alternative channel pilihan melalui teknologi informasi (media internet) ini.

Dengan tingkat pertumbuhan pengguna internet yang menunjukkan angka sangat fantastik, bahkan internet telah menjadi bagian kebutuhan dalam sebuah rumah tangga, fenomena ini menunjukkan bahwa 5 sampai 10 tahun yang akan datang teknologi informasi akan menguasai sebagian besar pola kehidupan masyarakat, sehingga model e-Government harus dipersiapkan dan dikembangkan dengan baik dan sedini mungkin (Kemeninfo, 2019).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis dapat menarik asumsi, sebagai berikut :

1. Kerjasama Indonesia – Jepang di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam bidang pengembangan e-Government di Indonesia akan berdampak pada meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur komunikasi dan informasi bagi terselenggaranya proses pelayanan publik secara efektif dan efisien.
2. Implementasi e-Government dapat berdampak pada meningkatnya kualitas dan kuantitas dengan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, menyelenggarakan, menguasai, dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, bagi kepentingan negara Indonesia (Kemeninfo, 2019).

#### **G. Hipotesis.**

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang akan penulis ajukan sebagai berikut : **“Program bantuan Jepang di bidang teknologi informasi diarahkan pada peningkatan pelayanan dari pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat Indonesia yang berupa data, informasi maupun perijinan, sehingga masyarakat dapat dilayani secara mudah dan cepat yang ditandai dengan adanya pelayanan online di bidang pemerintahan”**.

Definisi operasional yang penulis kemukakan adalah :

1. Kerjasama Indonesia – Jepang di bidang teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kaitannya dengan perkembangan e-Government di Indonesia, di segala bidang kehidupan masyarakat, khususnya industri, pemerintah, pendidikan, dan perdagangan.

2. Bidang teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari radio, telegram dan telepon, televisi, satelit telekomunikasi, hingga internet.
3. E-Government adalah upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah yang berbasis teknologi internet dengan system online dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

#### H. Operasionalisasi Variabel Penelitian.

Agar dapat menjaga alur dan tidak menyimpang dari tujuan semula, penulis mengajukan operasionalisasi variabel, sebagai berikut :

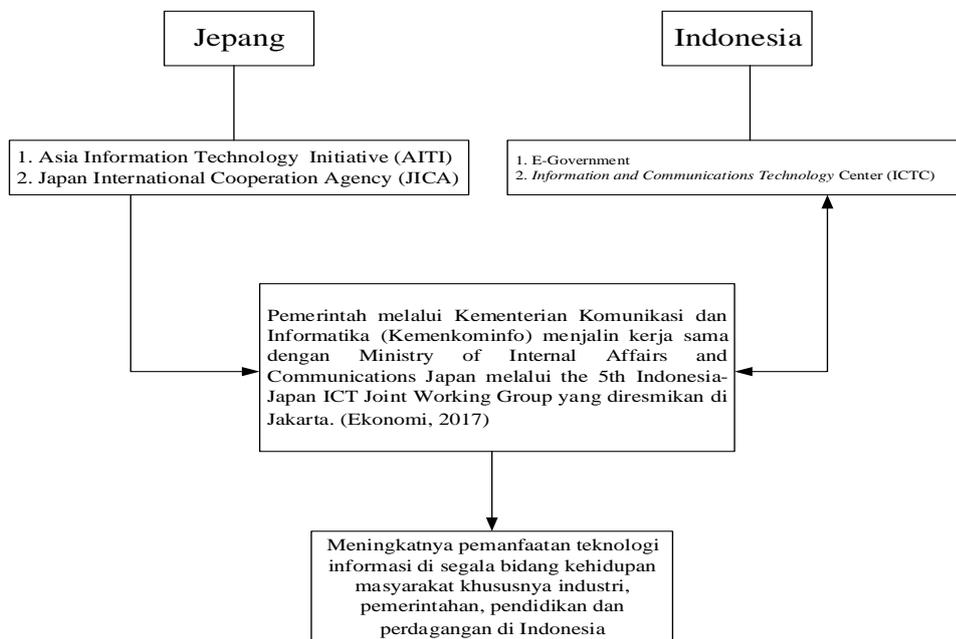
**TABEL 2.1**  
**OPERASIONALISASI VARIABEL**

Variabel	Indikator	Analisis Data
<i>Variabel Bebas :</i> Program bantuan Jepang di bidang teknologi informasi diarahkan pada peningkatan pelayanan dari pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat Indonesia yang berupa data, informasi maupun perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan Jepang di bidang teknologi informasi</li> <li>b. Pelayanan data, informasi maupun perijinan</li> </ol>	<p>Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalin kerja sama dengan Ministry of Internal Affairs and Communications Japan melalui the 5th Indonesia-Japan ICT Joint Working Group yang diresmikan di Jakarta. (Ekonomi, 2017)</p> <p>Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. (Kemenko Perekonomian, 2018)</p>
<i>Variabel terikat :</i> Sehingga masyarakat dapat dilayani secara mudah dan cepat yang ditandai dengan adanya pelayanan online di bidang pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat dapat dilayani secara mudah dan cepat</li> <li>b. Pelayanan online di bidang pemerintahan</li> </ol>	<p>Optimalisasi E-government dalam pelayanan publik untuk implementasi standar pelayanan. (Krisyanidayati, 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengantisipasi kendala dalam layanan e-KTP petugas sudah diberi bimbingan dan pelatihan bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sekaligus bagaimana cara</li> </ul>

		<p>mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat. (Mia Dyah Yuniati, 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Budgeting merupakan sebuah aplikasi sistem keuangan yang disimpan secara Online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. (Arianto Wardani, 2014)</li> <li>• Sistem elektronik juga diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pegawai pajak dalam melakukan pelaksanaan perpajakan. (Nita Rysaka, et. al, 2018)</li> <li>• Program Satu Juta Nama Domain merupakan salah satu program unggulan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk meningkatkan konten-konten positif dan produktif di Internet. (Kemeninfo, 2018)</li> </ul>
--	--	---

### I. Skema Teoritik Penelitian.

Memperhatikan uraian teori di atas, peneliti dapat sampaikan skema teoritik penelitian sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Skema Teoritik Penelitian**